Tujuh OPD Zona Merah, Realisasi Anggaran Tertinggi Perjalanan Dinas Kepala Daerah

https://www.cnbcindonesia.com/

Tanjung (Suara NTB) – Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Sarifudin, SH. MH., memimpin evaluasi organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemda KLU, Senin (30/9). Dari pelaksanaan hingga 13 September 2019, diketahui 7 OPD berada di zona merah dalam capaian realisasi anggaran.

Ke tujuh OPD yang berada di zona merah mencatakan capaian kinerja dari 0-40 persen. OPD tersebut antara lain, RSUD sebesar 20,81 persen dari Rp124,602 miliar, Dinas PUPR 30,90 dari Rp45,426 miliar, BKD PSDM 33,93 dari Rp3,543 miliar, Dishublutkan 34,44 dari Rp11,887 miliar, Dinas Sosial, Dinas Perindag, 37,84 dari Rp6,687 miliar, Dinsos 37,71 dari Rp 6,523 miliar dan Bapenda 39,10 dari Rp 8,621 miliar.

Sementara pada Zona Kuning (40-60 persen) meliputi, BPBD 58,89 persen, Bappeda 57,45 persen, Sekretariat Daerah, 57,05 persen. Selanjutnya disusul Kecamatan Pemenang, Kesbangpol, BPKAD, Perpustakaan dan Arsip, Disbudpar, Dinas Pengendalian Penduduk KB PMD, Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan dan Dinas LH. Dikpora selaku OPD pemegang anggaran terbesar, yakni Rp235,704 miliar lebih mencatatkan realisasi sebesar 41,93 persen.

Sedangkan pada zona hijau, pemegang rekor realisasi tertinggi dipegang oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Di mana Bupati dan Wakil Bupati telah mencairkan 67,94 persen dari total anggaran Rp782,184 juta. Selain itu, beberapa OPD yang mencatatkan kinerja bagus yaitu Kecamatan Kayangan 66,12 persen dari Rp 3,965 miliar, Satpol PP 65,36 persen dari 8,380 miliar, Sekretariat DPRD 65,38 persen dari 28,478 miliar. Kecamatan Bayan, Inspektorat, Gangga, Disnaker, DPRD KLU, Kecamatan Tanjung, Dukcapil dan Kominfo, 60,53 persen.

Melihat anggaran itu, Sarifudin usai rapat evaluasi mewanti-wanti OPD yang berada pada zona merah untuk lebih baik lagi. Kinerja kepala OPD sudah barang tentu menjadi sorotan pimpinan. Setidaknya masih ada waktu 3 bulan sebelum rekening seluruh program ditutup.

"Realisasinya harus dipercepat. Kata teman-teman tadi ada kendala teknis, tetapi saya kira harus mencari pola lain," kata Sarifudin.

Tidak hanya bagus di angka, ia juga meminta kinerja fisik di lapangan lebih baik dari yang dilaporkan. Pasalnya kegiatan fisik di lapangan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Di samping itu, wabup juga mengingatkan agar seluruh administrasi kegiatan tidak menyimpang dari aturan. Misalnya, pembayaran melewati batas tanggal pembayaran yang terjadi tahun lalu menyebabkan masalah dan menjadi temuan BPK. "Tentu ada penilaian, ada reward dan punishmentnya dan akan kita bicarakan dengan Pak Bupati," cetusnya.

Mendampingi Wabup, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Lombok Utara, Ir. H. Hermanto mengamini adanya kendala di tataran OPD. Beberapa kegiatan yang bersumber dari DAK (APBN) tidak bisa dieksekusi.

"Di Dikpora ada dana DAK yang tidak bisa dieksekusi, Karena pengajuannya (sebelum gempa) dulu rehab bangunan. Ketika terjadi gempa, bangunan yang mau direhab rusak, sehingga dananya otomatis tidak bisa digunakan," katanya.

Pada instansi lain sebut dia, terapat kendala program yang berbeda-beda. Seperti RSUD alkes dan fisik. Barang yang diadakan sudah mencapai 90 persen, namun dalam proses pembayarannya belum lengkap secara administrasi sehingga pembayarannya tertunda. (**ari**)

Sumber Berita:

1. https://www.antaranews.com/berita/991116/bkpm-dorong-ntb-ntt-terapkan-sistem-perizinan-oss
2. https://kanalntb.com/hasil-evaluasi-realisasi-anggaran-tujuh-opd-klu-dicap-merah/
3. https://www.suarantb.com/pilihan.editor/2019/10/277430/Tujuh.OPD.Zona.Merah,Realisasi.Anggaran.Tertinggi.Perjalanan.Dinas.Kepala.Daerah/

Catatan:

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri empat kategori yakni:
1. Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran;
2. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan;
3. Kepatuhan Terhadap Regulasi;
4. Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan.

12 Indikator Penilaian dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, yaitu:
1. Penyerapan Anggaran (bobot 20%);
2. Penyelesaian Tagihan (bobot 20%);
3. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 5%);
4. Data Kontrak (bobot 10%);
5. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) (bobot 10%);
6. Revisi DIPA (bobot 5%);
7. Pengembalian/Kesalahan SPM (bobot 5%);

8. Retur SP2D (bobot 5%);
9. Penyampaian LPJ Bendahara (bobot 5%);
10. Renkas/ RPD Harian (bobot 5%);
11. Nilai Pagu Minus Belanja Pegawai (bobot 5%);
12. Dispensasi Pengajuan SPM (bobot 5%).

(Sumber: https://djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/painan/id/berita/berita-terbaru/202-berita-kantor-pelayanan-perbendaharaan-negara/2845-sosialisasi-indikator-kinerja-pelaksanaan-anggaran.html)